

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan pertanian merupakan aktivitas ekonomi di Indonesia yang terus berkembang, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam berupa luasan lahan dan iklim yang mendukung bagi perkembangan sektor pertanian. Pelaksanaan kegiatan sektor pertanian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2013), menunjukkan penggunaan lahan di Indonesia pada tahun 2013 untuk budidaya tanaman pangan komoditas padi sebesar 13.835.252 ha, komoditas jagung sebesar 3.821.504 ha, dan komoditas ubi kayu sebesar 1.065.752 ha. Disamping itu dalam pemenuhan kebutuhan produk sayur- sayuran, pertanian Indonesia didukung dengan penggunaan luas lahan panen komoditas kentang sebesar 70.187 ha, luas area panen kentang 16,65% sebesar 11.688 ha berada di Jawa Timur, untuk areal panen kubis di Indonesia seluas 65.248 ha, 13,4% dari areal panen kubis tersebut seluas 8.793 ha berada di kawasan Jawa Timur, dan areal panen komoditas bawang daun atau bawang prei di Indonesia seluas 54.264 ha, 17,17 % luas areal sebesar 9.318 ha berada di kawasan Jawa Timur.

Kegiatan pertanian umumnya berada di daerah pedesaan, karena aktivitas bertani merupakan ketrampilan yang umum dikerjakan masyarakat pedesaan dan diajarkan secara turun- temurun. Demikian juga peran pertanian sebagai kegiatan ekonomi mandiri yang menjadi mata pencaharian utama. Menurut Nuhfil (2003) dalam manajerial bidang pertanian, terdapat beberapa kelemahan dalam pembangun pertanian di masa lalu, diantaranya adalah terfokusnya pada usaha tani, lemahnya dukungan kebijakan makro, serta pendekatannya yang sentralistik. Sehingga kondisi usaha pertanian sampai saat ini didominasi oleh usaha dengan skala kecil, modal terbatas, teknologi sederhana, sangat dipengaruhi musim, wilayah pasarnya lokal, umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga sehingga menyebabkan terjadinya involusi pertanian (pengangguran tersembunyi), akses terhadap kredit, teknologi dan pasar sangat rendah, serta pasar komoditi pertanian sifatnya mono/oligopsoni sehingga terjadi eksploitasi harga pada petani.

Skala usaha kecil, modal terbatas dan teknologi masih menjadi ciri dan kendala kegiatan pertanian dalam ekosistem (Selanjutnya disebut agroekosistem) di wilayah Indonesia. Penyelesaian kendala dalam kegiatan usaha ini, menurut Hafsah (1999) dapat diatasi dengan pelaksanaan kerjasama kemitraan, yang mana tujuan kemitraan yaitu meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat, meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan. Menurut Sumardjo (2004) kerjasama kemitraan memungkinkan terjadinya proses alih teknologi dari pengusaha kepada anggota mitra. Proses alih teknologi ini terjadi dalam kesepakatan kerjasama antara perusahaan mitra dan anggota mitra, misalnya dengan pemberian tanggung jawab oleh perusahaan mitra kepada anggota mitra dalam penyediaan bahan baku operasional kegiatan produksi perusahaan.

Kerjasama kemitraan menurut Daryanto (2007), merupakan mekanisme kelembagaan yang menambah kekuatan posisi tawar pelaku kemitraan. Kemitraan bertujuan meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang ikut serta dalam kerjasama kemitraan, dengan memperoleh manfaat peningkatan pendapatan, peningkatan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat usaha kecil, sehingga pada akhirnya akan tercapai peningkatan pertumbuhan ekonomi pedesaan. Bijman (2008), menyatakan bahwa kemitraan menjadi lebih penting untuk dilaksanakan dalam agroindustri, untuk peningkatan pembangunan perekonomian suatu negara. Perlu adanya wawasan pengetahuan tentang keuntungan dan kerugian dalam mengikuti kemitraan untuk petani dan kontraktor, sehingga pelaksanaan kemitraan berlaku secara efisien dan adil bagi semua pihak. Berdasarkan pengertian dan tujuan kemitraan maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama dalam bentuk kemitraan merupakan suatu mekanisme yang dapat mengatasi permasalahan permodalan dalam usahatani. Kemitraan menjadi alat satu faktor penting yang mendukung dalam usaha pembangunan pertanian.

Pelaksanaan kemitraan di Indonesia seringkali terdapat berbagai kendala dan kerugian yang ditanggung baik pengusaha mitra maupun anggota mitra. Kurangnya pemahaman hak dan kewajiban mitra seringkali terjadi pada pihak anggota mitra, kegiatan monopoli yang dilakukan oleh mitra pemilik modal sehingga merugikan bagi anggota mitra, dan kurangnya informasi terkait masing-

masing anggota mitra berakibat pada ketidak sesuaian pengambilan kebijakan (Sumardjo, 2007). Pelaksanaan kemitraan perlu adanya suatu prosedur atau tata cara dan persyaratan, yang mana prosedur tersebut menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam bermitra. Prosedur utama yang menentukan keberlangsungan kemitraan adalah perlunya mengenali siapa calon mitra, secara teknis persyaratan apa yang harus dimiliki oleh calon mitra, mengetahui apa tujuan calon mitra, sehingga sebelum menjalankan suatu hubungan kerjasama kemitraan perlu menentukan indikator kelayakan teknis dan moral calon mitra.

Menentukan indikator kelayakan teknis calon mitra penting dilakukan. Karena indikator ini merupakan perangkat teknis yang harus dimiliki baik pengusaha pemilik modal dan anggota mitra dalam kemitraan, sebagai penunjang serta jaminan kesuksesan berjalannya kerjasama kemitraan. Menurut Soekartawi (1993), faktor- faktor individu petani dalam pengambilan keputusan yang menunjang kelayakan teknis dalam berusahatani adalah usia petani, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, pengalaman usahatani dan luas lahan yang dimiliki individu petani. Kesesuaian lahan menjadi bahan pertimbangan penting sebagai indikator kelayakan teknis karena kondisi lahan merupakan aset utama dalam kegiatan budidaya. Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan tertentu (Ritung, 2007).

Penentuan indikator kelayakan moral calon mitra perlu disusun. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan perilaku moral (*Moral Hazard*) mitra selama proses kerjasama berlangsung. *Moral hazard* merupakan perilaku tidak jujur dalam memberikan informasi kepada pihak lain dalam proses pembuatan kontrak kerjasama, demi untuk memenuhi keuntungan pribadinya (Dowd, 2009). Kecenderungan perilaku *Moral Hazard* dapat terjadi karena kurangnya informasi yang mendasari sebuah keputusan ikut serta dalam kerjasama. *Moral Hazard* adalah kecenderungan perilaku menyimpang, yaitu keberanian mengambil resiko tinggi atas dasar pengetahuan bahwa kerugian dapat ditanggung pihak lain.

Pengusaha mitra dalam hal ini sebagai pihak yang dianggap memiliki kemampuan menanggung kerugian apabila terjadi kasus kegagalan usaha. Smith dan Watts (2010) mengemukakan bahwa tindakan sengaja melaksanakan

kecurangan prosedur kegiatan pertanian kasus di Amerika dengan mengurangi penggunaan faktor produksi pupuk pada tanaman sehingga terjadinya kegagalan panen atau produksi dibawah standar, kegagalan ini diajukan sebagai klaim atas asuransi usahanya untuk mendapat keuntungan ganti rugi biaya usaha. Tindakan *Moral Hazard* telah terjadi pada kasus ini, yaitu tindakan petani mengambil keputusan berisiko dengan mengurangi penggunaan faktor produksi pupuk, sehingga apabila terjadi kerugian dalam usahatani, dampak kerugian menjadi tanggung jawab pihak kedua.

Kegiatan agroekosistem di dataran tinggi Bromo utamanya adalah kegiatan pertanian dan peternakan. Disamping itu ekonomi wisata sedang berkembang pesat di kawasan ini, tapi tidak dapat dipungkiri agroekosistem masih menjadi kegiatan ekonomi utama yang dikerjakan oleh mayoritas penduduk kawasan dataran tinggi Bromo. Komoditas utama sektor pertanian pada kawasan ini umumnya adalah tanaman kentang, bawang prei, kubis, sawi, dan sebagian kecil jagung untuk konsumsi pribadi. Sektor peternakan yang menjadi kegiatan sampingan aktivitas bertani adalah hewan sapi, kuda, dan sebagian kecil babi.

Menurut Suwardi (1995), untuk mewujudkan pembangunan ekonomi pertanian di pedesaan diperlukan empat pilar penunjang, yaitu: (1) eksistensi semua komponen sistem agribisnis secara lengkap dilokalita pedesaan; (2) pentingnya kewirausahaan dan kemitraan antar pelaku agribisnis; (3) iklim lingkungan usaha yang kondusif yang memungkinkan berkembangnya agribisnis secara efisien; dan (4) adanya gerakan secara bersama dalam penumbuhan dan pengembangan agribisnis.

Kawasan agroekosistem di dataran tinggi Bromo merupakan wilayah di provinsi Jawa Timur yang penduduknya mayoritas adalah suku Tengger. Sebagian besar masyarakat Tengger menghuni wilayah desa penyangga berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang meliputi empat Pemda Tingkat II yaitu: Kabupaten Malang, Pasuruan, Probolinggo dan Lumajang. Suku Tengger merupakan penduduk asli Jawa yang menempati wilayah lereng deretan pegunungan Bromo Tengger Semeru.

Suku Tengger mempunyai pranata serta adat sosial budaya khas, agama, kepercayaan, kesenian, bahasa, serta organisasi sosial atau kelembagaan sendiri. Umumnya masyarakat tengger hidup pada sektor pertanian, terutama tanaman kentang, bawang prei, kubis, sawi, jagung, dan hewan ternak sapi, kuda, dan babi, serta sebagian kecil mengelola wisata, perdagangan yang menjalankan kerjasama kemitraan. Sehingga dengan kondisi tersebut menarik bagi peneliti untuk mengidentifikasi indikator kelayakan teknis dan moral mitra yang terjalin dalam kerjasama kemitraan dikawasan ini.

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi standar kelayakan teknis dan moral kemitraan masyarakat di kawasan agroekosistem dataran tinggi Bromo. Penelitian dilakukan di tiga desa pada kawasan agroekosistem dataran tinggi Bromo, yaitu desa Ngadas, Ngadisari, dan Wonokitri. Ketiga desa ini berada di kawasan dataran tinggi Bromo, dan mewakili tiga kabupaten yang ada dikawasan dataran tinggi Bromo, yaitu kabupaten Malang, Probolinggo, dan Pasuruan.

1.2 Rumusan Masalah

Kemitraan merupakan bentuk kerjasama yang bertujuan mensejahterakan masing- masing anggota di bidang perekonomian, yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup anggota mitra dan wilayah sekitarnya, sehingga secara nasional akan meningkatkan perekonomian suatu negara (Hafsah, 1999). Berbagai bentuk pola kemitraan yang sudah ada perlu dilaksanakan evaluasi dalam kegiatannya. Hal ini berguna bagi keberlanjutan kemitraan tersebut, sehingga tujuan mensejahterakan masing- masing pihak dapat tercapai dan menghindari intimidasi serta eksploitasi yang umumnya dilakukan oleh pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat atau pemilik modal.

Pelaksanaan evaluasi kegiatan kemitraan yang sudah ada dapat diperoleh informasi indikator kelayakan teknis dan moral calon mitra, berdasarkan pengalaman kerjasama mitra yang sudah ada. Informasi indikator kelayakan teknis dan moral tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengusaha/ investor dan mitra tani untuk menentukan calon mitra tersebut layak atau tidak secara teknis dan moral. Berdasarkan kegiatan penggambaran kemitraan yang ada

di desa Ngadas, Ngadisari, dan Wonokitri kawasan agroekologi dataran tinggi Bromo maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola kemitraan di desa Ngadas, Ngadisari, dan Wonokitri kawasan agroekosistem dataran tinggi Bromo yang sudah ada?
2. Apa saja indikator kelayakan teknis kemitraan kawasan agroekosistem dataran tinggi Bromo?
3. Apa saja indikator kelayakan moral kemitraan kawasan agroekosistem dataran tinggi Bromo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkapkan diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pola kemitraan di desa Ngadas, Ngadisari, dan Wonokitri kawasan agroekosistem dataran tinggi Bromo.
2. Mendeskripsikan indikator kelayakan teknis kemitraan di desa Ngadas, Ngadisari, dan Wonokitri kawasan agroekosistem dataran tinggi Bromo.
3. Mendeskripsikan indikator kelayakan moral kemitraan di desa Ngadas, Ngadisari, dan Wonokitri kawasan agroekosistem dataran tinggi Bromo

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diungkapkan diatas maka hasil penelitian dapat berguna sebagai:

1. Sebagai referensi untuk mengetahui kondisi kemitraan pada kawasan agroekosistem dataran tinggi Bromo bagi pemerintah dan investor.
2. Sebagai referensi untuk mengetahui indikator kelayakan teknis kemitraan pada kawasan agroekosistem dataran tinggi Bromo bagi pemerintah dan investor.
3. Sebagai referensi untuk mengetahui indikator kelayakan moral kemitraan pada kawasan agroekosistem dataran tinggi Bromo bagi pemerintah dan investor.
4. Sebagai referensi literatur untuk penelitian selanjutnya yang sesuai dengan topik penelitian penulis.